

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN TERHADAP JAKSA
BERBASIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
(Studi Tentang Implikasi Pergeseran Pengawasan Kejaksaan
dari Represif ke Preventif Terhadap Kinerja Jaksa)**

DISERTASI



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
YUNI ARTHA MANALU, S.H., M.H.
NIM. 11010114510032**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNI ARTHA MANALU, S.H., M.H**

NIM : 11010114510032

Alamat : Perumahan Legenda Wisata, Zona Mozart G2 No. 16
Cibubur, Kab. Bogor

Asal Instansi : Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 2019

Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
NIM. 11010114510032

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI

**REKONSTRUKSI MODEL PENGAWASAN TERHADAP JAKSA
BERBASIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
(Studi Tentang Implikasi Pergeseran Pengawasan Kejaksaan
dari Represif ke Preventif Terhadap Kinerja Jaksa)**

**YUNI ARTHA MANALU, S.H., M.H.
NIM. 11010114510032**

**Naskah Disertasi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan
Pada Ujian Terbuka Tanggal**

**Semarang,2018
Telah disetujui untuk diujikan oleh :**

Promotor

**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., M.Hum.
NIP.19481212 197603 1 003**

Co. Promotor I

**Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.H.
NIP.19621110 198703 1 004**

Co. Promotor II

**Dr. Nur Rochaety, SH., M.Hum.
NIP.19590328 198603 2 001**



**Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum.
NIP. 19620118 198703 1 002**

ABSTRAK

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI sebatas pengawasan yang bersifat represif yang ternyata dalam penerapan pengawasan represif tersebut masih tinggi angka pelanggaran tingkat sedang hingga berat. Untuk itulah fokus studi ini adalah rekonstruksi pengawasan dengan mewujudkan pengawasan secara preventif terhadap kinerja Jaksa berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam rangka peningkatan kinerja Jaksa. Problematika dalam Disertasi ini adalah bagaimana konstruksi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Jaksa selama ini? apakah betul pengawasan konvensional represif menyebabkan rendahnya kinerja Jaksa sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa? dan bagaimanakah rekonstruksi pengawasan terhadap kinerja Jaksa berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mampu meningkatkan kinerja Jaksa? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang eksisting seraya menggagas perwujudan pelaksanaan pengawasan baru yang penyusunannya didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretik dan praktis terkait dengan perwujudan pengawasan secara preventif dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Jaksa.

Metode kualitatif-konstruktivisme dengan pendekatan *socio-legal* digunakan dalam penelitian ini. Penelusuran data mengikuti arus penelitian hermeneutik dan fenomenologis yang digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, serta menyajikan data. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena temuan penelitian ini adalah Teori Pengawasan, Teori Sistem Hukum, Teori Kontrol Positif – Kontrol Negatif, Teori Konflik, dan Teori Bekerjanya Hukum. Tujuan akhir studi ini adalah rekonstruksi pengawasan dengan menggagas perwujudan pelaksanaan pengawasan secara preventif dalam rangka peningkatan kinerja Jaksa.

Studi ini menyimpulkan (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa (kondisi eksisting) lebih mengarah ke penindakan (represif) daripada ke pencegahan (preventif) karena langkah penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran selalu diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pengawasan konvensional represif yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa karena masalah moral dan integritas personil Kejaksaan sehingga diperlukan pengawasan yang dilakukan secara timbal balik yaitu pengawasan berimbang. (3) Rekonstruksi pengawasan yang berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) untuk meningkatkan kinerja Jaksa di masa mendatang yaitu perubahan regulasi yang terkait dengan manajemen pengawasan dimana regulasi sebelumnya lebih menekankan pada pengawasan secara represif diubah/diganti menjadi pengawasan secara preventif terlebih dahulu yang mana pengawasan secara represif digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila metode pengawasan secara preventif sudah dilakukan sehingga rekonstruksi pengawasan ini menggagas *Supervision Paradigmshift* dengan mengajukan model baru yang disebut dengan *Integratif Supervision* yang berarti mensinergikan paradigma pengawasan dengan merubah paradigma pengawasan intern dari *watchdog* menjadi *consultant* dan *catalist*. Atas dasar kesimpulan ini direkomendasikan revisi sistem pengawasan Kejaksaan yang efektif dan implementatif, yang didalamnya memuat penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mewujudkan jatidiri Jaksa yang mandiri dan mumpuni, memiliki kemampuan profesional, integritas pribadi dan disiplin tinggi dalam mengemban bakti profesi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pengawasan, Kinerja Jaksa, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

ABSTRACT

The supervision carried out by the Republic of Indonesia Attorney General's Office of Supervisory Apparatus was limited to repressive supervision which turned out that in the implementation of repressive supervision there was still a high rate of moderate to severe violations. For this reason, the focus of this study is the reconstruction of supervision by creating preventive supervision of the performance of prosecutors based on Good Governance General Principles (AUPB) in order to improve the performance of Prosecutors. The problem in this dissertation is how has the implementation of supervision been carried out on the performance of prosecutors so far? is it true that repressive conventional supervision has caused the Prosecutor's performance to be low so that many prosecutors committed violations? and what is the reconstruction of supervision of the Prosecutor's performance based on Good Government General Principles (AUPB) that are able to improve the Prosecutor's performance? This study aims to identify, analyze and explain the implementation of existing supervision while initiating the realization of the implementation of new supervision, the arrangement of which is based on Good Governance General Principles (AUPB). The results of this study are expected to contribute theoretically and practically related to the realization of preventive supervision in order to improve the performance of prosecutors.

Qualitative-constructivism method with a socio-legal approach was used in this study. Data search follows the flow of hermeneutic and phenomenological research used to collect, reduce, and present data. The theory used to analyze and explain the phenomenon of this research finding is Supervision Theory, Legal System Theory, Positive Control Theory - Negative Control, Conflict Theory, and Theory of Working Law. The ultimate goal of this study is the reconstruction of supervision by initiating the realization of the implementation of preventive supervision in order to improve the performance of prosecutors.

This study concludes (1) The implementation of oversight of the Prosecutor (existing conditions) is more directed towards repression (repressive) than to preventive (preventive) because the solution to the Prosecutor who committed the violation is always resolved based on Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants; (2) Conventional repressive oversight that causes many violations committed by Prosecutors due to moral issues and integrity of the Prosecutor's personnel so that supervision is required in a reciprocal manner, namely balanced supervision. (3) Reconstruction of supervision based on Good Governance General Principles (AUPB) to improve prosecutors' performance in the future, namely changes in regulations related to supervisory management where previous regulations emphasized repressive supervision changed / replaced into preventive supervision first where repressive supervision is used as a last resort (ultimum remedium) if the preventive supervision method has been carried out so that this supervision reconstruction initiated the Paradigmshift Supervision by proposing a new model called Integrative Supervision which means synergizing the supervision paradigm by changing the internal supervision paradigm from watchdog to being a consultant and catalyst. On the basis of this conclusion it is recommended to revise an effective and implementable Prosecutor's supervision system, which includes the application of Good Governance General Principles (AUPB) in particular transparency, accountability, and participation to realize the identity of a Prosecutor who is independent and capable, has professional abilities, personal integrity and high discipline in carrying out professional services to the community, nation and country.

Keywords: Reconstruction, Supervision, Prosecutor's Performance, Good Governance General Principles (AUPB).